

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. UU No. 3. LN No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357.

———. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

———. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU No. 7. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

———. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang*. LN. Nomor 30 Tahun 2002 TLN. Nomor 4191.

———. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. LN. Nomor 108 Tahun 2003. TLN Nomor 4324.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*. PBI Nomor 5/21/PBI/2003.

———. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Keputusan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Kuangan Nomor 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: PPATK, 2003.

———. *Pedoman II Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: PPATK, 2003.

———. *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: PPATK, 2003.

———. *Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:3/9/KEP.PPATK/2003 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan*. Jakarta: PPATK, 2003.

- .Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jakarta: PPATK, 2004.
- . Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, 2004.
- . Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, 2004.
- .Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.01/PPATK/01/10 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010-2014. Jakarta: PPATK, 2009.
- . Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02/PPATK/112009 tentang tata cara pertukaran informasi, Berita Negara Nomor 549 Tahun 2009. Jakarta: PPATK, 2009.

## **B. BUKU**

- Badruzaman, Mariam Darius. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Black Law Dictionary.
- | Duadji, Susno. *Selayang Pandang Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal*. Bandung: Books Terrace& Library, 2008.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Finacial Action Task Force On Money Laundering. FATF-VII Report on Money  
Ensiklopedia Nasional Indonesia. jilid 7. cet. Pertama. PT. Cipta Adi  
Pustaka; Jakarta, 1989.
- Friedmann, Lawrence M. *American Law*. London, New York: W.W Norton &  
Company, 1984.
- Fuadi, Munir. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Nomor  
10 Tahun 1998)*. Cet. ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ganarsih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*. cet. 1.  
Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
2003.

Gilmore, William C. *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*. Council of Europe Publishing, Belgium, 1999.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Huum dan Mahkamah Agung RI*. cet. I. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.

Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace and Library, 2007.

———. *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

———. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2005.

International Monetary Fund, The World Bank Group, *Financial Intelligence Units An Overview*, (Washington DC: International Monetary Fund, 2004.

Judissono, Rimsy K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Karo, Ida Sampit, et. al. "Sistem Pembuktian Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." Laporan Penelitian Lanjut Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Surabaya, 2008.

Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Muller, Wouter H., Christian H. Kalin dan John G. Goldsworth. *Anti Money Laundering International Law and Practice*. England: John Willey & Sons, 2007.

Priyanto, et. al. *Rezim Anti Pencucian Uang: Perjalanan 5 tahun*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2007.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Buletin Statistik*, Volume 2/Thn I/2010, hal. 2.

———. *Teori dan Metode Anti Pencucian Uang 1*. Jakarta: PPATK, 2007.

Quirk, Peter J. *Money Laundering: Muddying the Macro Economic*. March 1997.

- Rahadjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni: Bandung, 1979.
- Rajagukguk, Erman. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004.
- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1991.
- Schott, Paul Allan. *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. Washington: The World Bank, 2003.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- Soekanto, Soerjono *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekarnaen, Andrianto & Kun Wahyu Winasi. "Kolam Pencucian Nan Aman". Trust (September 2002).
- Sutantio, Retnowulan. *Rahasia Bank: Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata dan Pidana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994.
- Tunggal, Imam Syahputra. *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering dan Teknik-Teknik Pengungkapannya*. Jakarta: Harvarindo, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press, 1993.

### C. ARTIKEL

Arief, Barda Nawawi. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait." *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 22 Tahun 2003). Hlm. 18.

Baldwin Jr, Fletcher N. "Money Laundering and Wire Transfer: When the New Regulation Take Effect, Will They Help?" *DICK J. Int'l L.*, Vol 14, 1996.

Editorial, "Menyikapi Globalisasi Pencucian Uang." *Majalah Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22 No. 3 Tahun 2003.

Fletcher, N. Baldwin Jr. "Money Laundering and Wire Transfer: When the New Regulation Take Effect, Will They Help?" *Dick J. Int'l L.* (Vol 14 Tahun 1996). Hlm. 421

Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 22 Nomor 3 Tahun 2002). Hlm. 24.

———. "Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Startegis dan Perkembangan Terkini".

———. *Soal Cuci Uang, Indonesia Dianggap Aman*. Majalah Pilars, Nomor 03, Thn. VIII. 24-30 Januari 2005.

———. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disampaikan dalam Rapat Umum Dengar Pendapat Panitia Khusus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan Kepala PPATK tanggal 6 Mei 2010 di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.

———. "Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Daftar NCCTs: Kerja Keras yang Berkelanjutan." *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* (Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2005). Hlm. 9-25.

———. "Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer". Jakarta 5 September 2002.

Laundering Typologies, Annex 3. 28 June 1996:5.

[McDonell, Rick. Establishment of the FIU. Workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta, tanggal 16 Desember 2002.](#)

Newsletter Komisi Hukum Nasional, "Tindak Pidana Pencucian Uang", Edisi Mei, 2003, hal. 18-19.

Kompas, pastikan asal uang, Neloe akan diperiksa, sabtu 4 Maret 2006, hal. 3.

#### D. INTERNET

Amri, Arfi Bambani. "PPATK: Pencucian Uang Masih Marak, Belum Berlakunya Single Identity Number Memudahkan Pencucian Uang." <http://us.korupsi.vivanews.com>. Diunduh 22 April 2010.

Grehenson, Gusti. "Trend Modus Pencucian Uang Gunakan Identitas Palsu di Perbankan Kian Meningkat". <http://www.gadjahmada.edu/index.php?page=rilis&artikel=1754>. Diunduh 22 April 2010.

Husein, Yunus. "Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Startegis dan Perkembangan Terkini". [http://www.ppatk.go.id/content.php?s\\_sid=1477](http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1477). Diunduh 22 April 2010

———. "Rapor Memberantas Money Laundering". <http://www.ppatk.go.id>. Diunduh 22 April 2010.

<http://www.moneylaundering.com/freeresource/mlaws.aspx>

<http://www.ppatk.go.id>.

| [yunushusein.files.wordpress.com/2007/.../22\\_peranan-ppatk-sebagai-fiu](http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/.../22_peranan-ppatk-sebagai-fiu).